

Primary School Education Policy in Buleleng Regency, Bali Through Real Condition Analysis

Kebijakan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng, Bali Melalui Analisis Kondisi Nyata

<https://doi.org/10.24036/pakar.v21i2.383>

Luh Tu Selpi Wahyuni^{1*}, Nyoman Ayu Putri Lestari¹, I Made Aditya Dharma¹, Ida Bagus Putu Arnyana², Nyoman Dantes²

¹Universitas Triatma Mulya, Indonesia

²Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*E-mail: selpi.wahyuni@triatmamulya.ac.id

Abstract

Education is an important aspect of human existence as it promotes human enhancement in the emotive, cognitive, and psychomotor domains. The implementation of an educational wisdom model can be in the form of ideas, outlines, diagrams, or numerical states that are used to clarify, clarify, and present parts of a real instructional problem. Therefore, this study aims to conduct a mini-research to share suggestions about educational wisdom. This research method is descriptive quantitative. The research location was in all primary schools in Buleleng Regency. The object of the research was primary schools in Buleleng district. The research subjects were students and teachers in Buleleng district. The results of the study showed a low student-teacher ratio, namely Banjar sub-district 16.59, Buleleng sub-district 17.71, and Busungbiu sub-district 14.74 with this low ratio interpreted as the three sub-districts having an excess of primary school teachers. Ideas for intelligence that can be provided include the ideal ratio of students to teachers must be met, as well as school facilities, complete and appropriate learning facilities, teacher availability and competence, principal availability and competence, service personnel availability and competence, labour availability and competence, librarian availability and competence, and the ideal ratio of students to teachers. It is recommended to education policy managers to match the actual needs in primary schools that refer to the 8 education standards.

Keywords: Education policy, Primary School, Real Condition Analysis

Abstrak

Pendidikan adalah aspek penting dari keberadaan manusia karena mempromosikan peningkatan kualitas manusia dalam domain emotif, kognitif, dan psikomotorik. Implementasi dari model kearifan pendidikan dapat berupa ide, garis besar, diagram, atau keadaan numerik yang dipergunakan untuk memperjelas, mengklarifikasi, dan menyajikan bagian-bagian dari suatu kenyataan masalah instruksional. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan riset mini untuk membagikan anjuran mengenai kearifan pendidikan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian berada di seluruh SD/MI yang berada di Kabupaten Buleleng. Objek penelitian adalah sekolah dasar yang ada di kabupaten Buleleng. Subjek Penelitian adalah siswa dan guru-guru yang ada di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian jumlah rasio guru-murid yang rendah, yakni Kecamatan Banjar 16.59, Kecamatan Buleleng 17.71, dan Kecamatan Busungbiu 14.74 dengan rendahnya rasio ini dimaknai sebagai tiga kecamatan tersebut memiliki kelebihan guru sekolah dasar. Gagasan kecerdasan yang dapat diberikan meliputi rasio ideal siswa dengan guru harus terpenuhi, demikian juga dengan fasilitas sekolah, sarana pembelajaran yang lengkap dan layak, ketersediaan dan kompetensi guru, ketersediaan dan kompetensi kepala sekolah, ketersediaan dan kompetensi tenaga pelayanan, ketersediaan dan kompetensi tenaga kerja, ketersediaan pustakawan, dan kompetensi, serta rasio ideal siswa dengan guru. Disarankan kepada pengelola kebijakan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan aktual di sekolah dasar yang mengacu pada 8 standar pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Sekolah Dasar, Analisis Kondisi Nyata

1. Pendahuluan

Undang Undang Dasar 1945 menguraikan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang harus dipertahankan sepanjang masa adalah mencerdaskan kebudayaan tanah air (Yuliartini, 2021). Pendidikan diperlukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah aspek penting dari keberadaan manusia karena mempromosikan peningkatan kualitas manusia dalam domain emotif, kognitif, dan psikomotorik (Disas, 2019). Dinas pendidikan mengembangkan kearifan pendidikan, pengumuman pendidikan termasuk guru dan siswa, dan umpan balik masyarakat dengan menelaah kesulitan dan solusi pendidikan (Gusti et al., 2023). Implementasi dari model kearifan pendidikan dapat berupa ide, garis besar, diagram, atau keadaan numerik yang dipergunakan untuk memperjelas, mengklarifikasi, dan menyajikan bagian-bagian dari suatu kenyataan masalah instruksional untuk dibenahi dengan merancang serta mentransfer proposal dan kegiatan pengembangan untuk membereskan masalah dan menarik perhatian khalayak (Alfirzan et al., 2021).

Jika kebijakan tidak dijalankan, mereka akan tetap menjadi mimpi atau ide-ide bagus yang tersimpan rapi dalam arsip (Renaldi & Frinaldi, 2022). Akibatnya, implementasi kearifan harus dilakukan secara hati-hati, situasional, dengan rasa cakap, dan dengan pemahaman pemberdayaan (Elih Yuliah, 2020). Namun demikian, terdapat permasalahan yang berbeda di bidang pendidikan, yakni masih banyaknya kekurangan guru di satuan pendidikan, khususnya sekolah negeri (Sabon, 2023). Lebih lanjut, ada tiga masalah mendasar dalam kearifan pendidikan. Pertama, pola perumusannya masih dikuasai oleh elit kekuasaan. Kedua, banyak perumusan kearifan pendidikan yang dirancang dengan cara yang rumit dan mahal, Ketiga, berbagai paket kearifan tentang terobosan pendidikan hampir selalu dilakukan secara cepat dan tidak memperhitungkan berbagai detail yang tersirat (Amri, 2021). Selain itu, berbagai isu tradisional, seperti kualitas, kuantitas, kesetaraan, dan administrasi terus menjadi kendala skema pendidikan di Indonesia (Fortuna et al., 2023). Kearifan pendidikan membagikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan pendidikan salah satunya di Kabupaten Buleleng, khususnya pada pengertian mendasar tentang pendidikan.

Undang-Undang Skema Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2003 serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang berisikan 8 Standar Pendidikan adalah contoh kearifan makro dalam bidang pendidikan. Kearifan tingkat makro ini akan dijadikan pantokan bagi terbentuknya kearifan tingkat menengah dan mikro (Abdullah, 2020). Untuk melindungi berhasilnya standar nasional pendidikan, diperlukan kearifan pendidikan. Penetapan Standar Nasional Pendidikan diyakini dapat meningkatkan mutu pendidikan dalam proses pembangunan. Standar program wajib belajar harus mematuhi Standar Nasional Pendidikan yang ialah kriteria dasar skema pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Peraturan Menteri Nasional memuat Standar Nasional Pendidikan yang mencakup delapan topik.

Pemerintah Kabupaten Buleleng harus mematuhi pedoman tersebut. Kabupaten Buleleng yang terletak di sebelah utara pulau Bali merupakan wilayah yang aktif berkembang di berbagai sektor. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu wilayah di Pulau Bali yang memiliki luas daratan terluas dari kabupaten manapun yang ada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki luas total 1.364,73 km². Kabupaten Buleleng terbagi menjadi sembilan kecamatan yaitu, Gerogak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Sawan, Kubutanbahan, Tejakula, dan Buleleng (Situmorang & Wesnawa, 2018). Sudah sejak lama pendidikan pada umumnya dan di Buleleng pada khususnya dilanda masalah pembelajaran. Ada perbedaan pendidikan yang signifikan antarwilayah dan kelompok sosial (Sedana, 2022). Kabupaten Buleleng memiliki 484 SD, 476 SD untuk sekolah negeri, dan 8 SD swasta. Berdasarkan peta mutu pendidikan tahun 2020, terdapat

delapan indikator yang kinerjanya rendah. Tersediannya kecakapan guru, kepala sekolah, tenaga perpustakaan, dan operator sekolah. Sekolah mempunyai sarana dan prasarana pembelajaran yang lengkap dan memadai, serta sarana dan prasarana penunjang yang lengkap dan layak. (Sudarma & Sumanaya, 2020).

Kesenjangan dalam dunia pendidikan menjadi benalu dalam pertumbuhan pendidikan di Indonesia yang saat ini memasuki era global (Ihsan et al., 2021). Oleh sebab itu, diperlukan kearifan pendidikan yang dibuat demi kepentingan generasi penerus bangsa, berwawasan global serta tidak melupakan kearifan lokal, tersediannya sarana dan prasarana yang memadai, dan guru-guru yang memiliki kecakapan pedagogi, profesional, dan hubungan sosial yang baik. Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian ini tertarik melakukan sebuah riset tentang kearifan pendidikan di Kabupaten Buleleng, Bali.

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif (Sugiyono, 2013). Tujuan penelitian pendekatan deskriptif adalah untuk mengumpulkan data aktual yang luas yang menggambarkan gejala saat ini, mengidentifikasi masalah, dan membuat perbandingan atau penilaian. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif diadopsi. Penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan bertujuan untuk menentukan nilai variabel bebas yang paling sedikit satu variabel, tanpa menarik perbandingan atau berkorelasi dengan variabel lain (Jayusman, 2020; Sulistyawati et al., 2022). Lokasi penelitian berada di seluruh SD/MI yang berada di Kabupaten Buleleng. Objek penelitian adalah sekolah dasar yang ada di Kabupaten Buleleng. Subjek Penelitian adalah siswa sekolah dasar yang tercatat dalam dapodik dinas pendidikan dan guru-guru yang ada di Kabupaten Buleleng.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini berupa deskripsi jumlah murid, jumlah rombongan belajar, guru, ruang kelas, ruang lab, rang perpus, rasio guru-murid, dan rasio kelas murid. Melalui analisis kuantitatif ini maka dapat dirancang berbagai tawaran kearifan-kearifan yang harus ditempuh pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di jenjang pendidikan dasar. Tercatat Kabupaten Buleleng memiliki 9 Kecamatan dengan total 466 sekolah dasar.

Tabel.1. Keadaan Murid-Guru Sekolah Dasar 9 Kecamatan

Kecamatan	Akumulasi murid	Akumulasi rombongan	guru	Ruang kelas	Ruang lab	Ruang Perpus	Rasio guru-murid	Rasio kelas-murid
Kec. Banjar	7169	359	432	353	1	46	16.59	19.96
Kec. Buleleng	13.981	580	786	603	14	70	17.71	24.1
Kec. Busungbiu	3952	309	268	268	0	35	14.74	12.7
Kec. Gerokgak	7633	339	286	239	2	34	26.68	22.5
Kec.Kubutambahan	6479	366	279	292	1	42	23.22	17.7
Kec.Sawan	6866	378	289	291	1	41	23,75	18.16
Kec Seririt	7029	325	318	317	0	48	22.10	21.62
Kec.Sukasada	8223	501	382	387	1	43	21.52	16.41
Kec Tejakula	6388	309	266	280	0	40	24.01	20.67

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng 2023

3.2. Pembahasan

Berdasarkan tabel 1. diperoleh data bahwa kondisi ideal rasio idela guru dan murid menurut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 yakni guru dengan siswa 20-23 (1:20-32). Akibatnya, tiga kecamatan di kabupaten tersebut memiliki rasio guru-murid yang buruk, yaitu Kecamatan Banjar 16,59, Kecamatan Buleleng 17,71, dan Kecamatan Busungbiu 14,74. Hal ini dilihat dari kelebihan guru SD di tiga kecamatan tersebut. Sedangkan Gerokgak, Kubudindingan, Sawan, Seririt, Sukasada, dan Tejakula masih kekurangan guru SD di Kabupaten Buleleng. Pentingnya rasio guru-murid yang seimbang agar pembelajaran dapat mengalir dengan lancar dan efektif untuk semua murid. Ada batasan seberapa banyak instruktur dapat memimpin siswa mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Rasio guru-murid yang tepat adalah hubungan antara jumlah guru dan jumlah murid (Qori, 2022). Jumlah kelompok belajar merupakan salah satu penentu jumlah jam mengajar yang harus diisi oleh instruktur (Sinaga et al., 2022). Keterlibatan seorang guru dalam manajemen kelas sangat penting, terutama dalam menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menyenangkan (Hawa et al., 2023).

3.2.1 Ketersediaan Guru

Guru harus memiliki setidaknya dua gelar akademik, yaitu kualifikasi pendidikan formal dan kualifikasi untuk uji tuntas dan kesetaraan. Gelar pendidikan formal adalah kualifikasi sarjana empat tahun. Selanjutnya, kualifikasi ini harus berorientasi pada mata pelajaran pendidikan. Dengan demikian, pengajar yang mendidik adalah mereka yang benar-benar terampil dalam bidang pendidikan. Sementara itu, sertifikat pendidik dan kesetaraan kualifikasi merupakan persyaratan akademik yang diperlukan untuk dipekerjakan sebagai guru (Lafendry, 2020). Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008, guru harus memiliki empat cakap, yaitu cakap pedagogik, cakap personal, cakap profesional, dan cakap sosial (Adriana & Agustina, 2019). Guru sekolah dasar harus memiliki minimal empat kecakapan. Pertama, cakap pedagogik, yaitu mampu mengatur pembelajaran siswa. Kedua, cakap kepribadian mampu menjadi teladan bagi peserta didik dan memiliki kepribadian berakhlak mulia, arif dan bermartabat. Ketiga, cakap sosial adalah guru mempunyai kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, sesama guru, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar. Keempat, cakap profesional adalah guru memiliki kemampuan yang luas dan holistik tentang topik mata pelajaran.

3.2.2 Ketersediaan Kepala Sekolah

Kepala sekolah diperlukan di seluruh jenjang satuan pendidikan, terkhusus di sekolah dasar karena sosok kepala sekolah berperan sangatlah penting dalam segala aktivitas di sekolah. Kepala sekolah harus dapat mencapai visi dan misi lembaga sekolah tempatnya bertugas dalam mengabdikan diri. Kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan dalam memberdayakan tenaga pendidik tugasnya, yakni mampu mebagikan kinerja dengan adil, dapat membantu dalam peningkatan kecakapan dan kualitas tenaga pendidik melalui program yang disusun dengan terencana (Rafid & Tinus, 2019). Kepala sekolah lebih paham mengenai situasi dan kondisi di sekolahnya. Kepala sekolah wajib datang tepat waktu, mengenal instruktur, pendidik, siswa dan orang tua siswa yang ada di sekolahnya. Melalui mengetahui lingkungan internal dan eksternal sekolah secara menyeluruh, maka sekolah akan dikelola dengan baik, serta lebih peka dan kepala sekolah dapat menerima komentar positif mengenai keinginan warga sekolah agar sekolah berkembang lebih baik (Manajemen & Pendidikan, 2018). Selain itu, kepala sekolah juga harus memiliki bakat berorientasi pada kualitas pendayagunaan sumber daya yang ada di sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala

Sekolah/Madrasah, seorang kepala sekolah harus memiliki lima dimensi cakap minimal, yaitu cakap kepribadian, manajerial, pramuka, supervisi, dan sosial (Mustabsyiroh et al., 2021).

3.2.3 Ketersediaan dan Kecakapan Tenaga Administrasi Sesuai Ketentuan

Organisasi sekolah juga terlibat dalam menawarkan administrasi manajerial kepada setiap individu yang terlibat erat. Persyaratan tenaga administrasi sekolah diatur pemerintah dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2008 karena kedudukan dan tanggung jawab tenaga administrasi sekolah begitu penting bagi manajemen sekolah. Persyaratan dan kualifikasi minimum untuk staf administrasi sekolah diatur oleh standar ini. Seperti di sekolah yang sangat membutuhkan SDM untuk menunjang kualitas (Muspawi & Robi'ah, 2020). Upaya peningkatan mutu pendidikan yang berkaitan dengan proses pendidikan, antara lain dengan meningkatkan mutu administrasi sekolah, tidak hanya guru atau instruktur tetapi juga tenaga administrasi. Untuk administrasi sekolah yang efisien, diperlukan administrator sekolah yang profesional. Untuk mempercepat proses belajar mengajar di sekolah, diperlukan suatu komponen yang dikenal sebagai tenaga administrasi atau administrasi sekolah. Tenaga kependidikan adalah layanan kerja yang memerlukan keterampilan, keahlian, dan kemampuan yang unik dan berbeda dari yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk memfasilitasi pembelajaran. Sesuai dengan peraturan kepegawaian, tenaga fungsional lainnya tidak dapat memikul tanggung jawab pendidikan tenaga administrasi sekolah (Nuraini et al., 2023).

3.2.4 Ketersediaan Laboran

Sekolah perlu memiliki laboratorium karena merupakan bagian terpenting dalam proses pembuatan dan berbagi informasi. Oleh karena itu, mereka perlu melatih orang yang bekerja di dalamnya. Akibatnya, pekerja laboratorium memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan bahkan kematian laboratorium. Salah satu tenaga kependidikan yang dibutuhkan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran di sekolah melalui kegiatan laboratorium adalah tenaga laboratorium sekolah (Amirullah, 2018). Seperti staf pendidikan lainnya, pekerja laboratorium sekolah harus memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang keahliannya. Selain itu, surat keterangan dari kepala laboratorium sekolah/madrasah dari universitas atau lembaga lain yang diakui pemerintah, serta surat keterangan dari tenaga laboratorium dari perguruan tinggi dipersyaratkan oleh Permendiknas Nomor 26 Tahun 2008, yaitu tentang Standar Sekolah Petugas Laboratorium Madrasah. Di lembaga ini, anggota pengelola laboratorium masih menjabat sebagai instruktur IPA yang merangkap sebagai staf dan direktur laboratorium (Nahdiyaturrahmah et al., 2020). Kecakapan tenaga kerja yang dibutuhkan meliputi cakap manajerial dalam pengorganisasian guru, tenaga kerja, dan teknisi, manajemen dan administrasi program. Cakap dalam pemantauan dan evaluasi dan dimensi cakap profesional meliputi pengembangan dan memberikan terobosan (Suwarno, 2019).

3.2.5 Ketersediaan Pustakawan

Perpustakaan menjadi hal yang penting di tingkat sekolah dasar karena digunakan untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa. Ketersediaan bahan pustaka merupakan komponen penting dari perpustakaan sekolah. Perpustakaan tidak dapat membagikan layanan terbesar kepada pembaca, kecuali memiliki pilihan sumber daya perpustakaan yang memadai yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pembaca dapat tertarik untuk melengkapi sumber pustaka di perpustakaan (Iryanto, 2021). Kecakapan yang dimiliki pustakawan diartikan sebagai kemampuan profesional dan pribadi pustakawan untuk melaksanakan tugas pekerjaan perpustakaan. Kecakapan pustakawan mensyaratkan setiap pustakawan beroperasi dengan baik

di setiap departemen perpustakaan perpustakaan. Kecakapan pustakawan dimaksudkan untuk membereskan kekurangan-kekurangan perpustakaan yang terwujud dalam bentuk evaluasi pengguna setelah memanfaatkan perpustakaan (Pebrian et al., 2019).

3.2.6 Sekolah Memiliki Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang Lengkap dan Layak

Penataan dinas dan yayasan untuk membantu hakikat pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Republik Indonesia tentang Rencana Persekolahan Umum yang menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal diharapkan memberikan jabatan dan kerangka untuk memenuhi tujuan instruktif yang diubah sesuai dengan perkembangan dan peningkatan potensi aktual, keilmuan, sosial, mendalam, dan komitmen mahasiswa. Selain itu, pengelolaan pendidikan sangat bergantung pada prasarana dan sarana pendidikan yang sangat menentukan proses belajar mengajar. Fasilitas untuk pendidikan tidak bisa diabaikan (Wardani & Trihantoyo, 2021). Program belajar mengajar memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih besar. Kegiatan belajar mengajar akan lebih bermakna, bermutu, dan menyenangkan apabila tersedia sarana dan prasarana pendidikan (Megasari, 2019).

4. Kesimpulan

Penelitian ini adalah kebijakan pendidikan di Sekolah Dasar Kabupaten Buleleng meliputi kebijakan, proporsi siswa dan guru yang seimbang, ketersediaan guru yang memiliki kecakapan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Ketersediaan kepala sekolah berkompeten dalam menjalankan visi dan misi sekolah. Ketersediaan administrator sekolah yang profesional sehingga dapat mengerjakan administrasi sekolah, ketersediaan laboran yang memiliki lisensi resmi dari kementerian pendidikan, ketersediaan pustakawan yang mamamu mengecek buku dengan teliti, dan ketersediaan sarana prasarana pembelajaran yang lengkap dan layak. Disarankan bagi penyelenggara kebijakan pendidikan adalah kebijakan pendidikan harus sesuai dengan kondisi nyata di sekolah dasar yang mengacu pada 8 standar pendidikan.

5. Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2020). Manajemen Pendidikan Kontemporer: Konstruksi Pendekatan Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal. In *CV Cendekia Press*.
- Adriana, Y., & Agustina, R. L. (2019). Teacher Competence in the Era of the Industrial Revolution 4.0. *Ilmiah Kependidikan*, 14(71672204), 32–40. <https://doi.org/10.33654/jpl.v14i2.907>
- Alfirzan, A., Nasri, Y., & Gistituati, N. (2021). *Education Policy and Implementation of Education Policy*. 5(1), 1527.
- Amirullah, G. (2018). Pengelolaan dan Pemanfaatan Laboratorium Sekolah Bagi Guru Muhammadiyah di Jakarta Tomur. *SOLMA*, 07(1), 127–137.
- Amri, U. (2021). konsistensi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Pahlawan*, 3(5), 2201. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5>
- Disas, E. P. (2019). Analisis kebijakan pendidikan mengenai pengembangan dan peningkatan profesi guru. *Penelitian Pendidikan Indonesia*, 17(14), 2.
- Elih Yuliah. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *At-Tabdir*, 30(2), 130. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i2.58>

- Fortuna, A., Rahmansyaf, I., Prasetya, F., Syaputra, W. Z., Rahmadhani, D., Saklaili, S., Bagus, M. I., Linda, E. S., Andriani, W., Muhammad, T., & Deria, A. (2023). Design of Prototype Model Augmented Reality-Based Disaster Mitigation Learning Media as a Disaster Education Facility. *PAKAR Pendidikan*, 21(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/pakar.v21i1.287>
- Gusti, U. A., Akbar, H., Rismawati, R., Putri, A. R., & Sintya, D. (2023). Development of Student Moral Learning Applications as an Effort to Strengthen Character Education for Elementary School Students. *PAKAR Pendidikan*, 21(1), 28–36. <https://doi.org/10.24036/pakar.v21i1.285>
- Hawa, S., Rahmadani, N., & Sari, V. (2023). Implementation of Classroom Management in Improving the Effectiveness of Elementary Islamic Education Learning. *Mumtaz*, 3(1), 64.
- Ihsan, R. A. N., Jannah, A. M., Sofia, M. N., Budiyaniti, N., & Gunawan. (2021). Problematika Pendidikan. *Jre*, 1(1), 18.
- Iryanto, N. D. (2021). Availability of Library Materials to Optimize Reading Interest of Elementary School Students. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 2660. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3218>
- Jayusman. (2020). Student Learning Activities Using Edmodo-Based Learning Management System (Lms) Learning Media in Learning History. *Jurnal Artefak*, 7(1), 13. <https://doi.org/10.25157/ja.v7i1.3180>
- Lafendry, F. (2020). Kualifikasi dan kompetensi guru dalam dunia pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam (2020)*, 3(2), 3.
- Manajemen, J., & Pendidikan, S. (2018). Strategi Kepala Sekolah Di daerah. *JMKSP*, 3(1), 81.
- Megasari, R. (2019). Improving Educational Facilities and Infrastructure to Improve the Quality of Learning at SMPN 5 EvidenceHigh. *Bahana Manajemen Pendidikan*, 2(1), 637.
- Muspawi, M., & Robi'ah, H. (2020). Realisasi Kinerja Tenaga Administrasi Sekolah dalam Peningkatan Pelayanan. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 4(3), 232–239. <https://doi.org/10.17977/um025v4i32020p232>
- Mustabsyiroh, N., Prestiadi, D., & Imron, A. (2021). Implementation of Virtual Academic Supervision as an Effort to Increase Teacher Competence in The Covid-19 Pandemic. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 589, 112–115.
- Nahdiyaturrahmah, Pujani, N. M., & Selamat, K. (2020). Pengelolaan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP Negeri 2 Singaraja. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sains Indonesia (JPPSI)*, 3(2), 118–129.
- Nuraini, N., Afriza, A., & Andriani, T. (2023). Competency Development as an Effort to Improve the Performance of School Administrative Personnel. *Jmpis*, 4(1), 490. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>
- Pebrian, Winato, Y., & Saefudin, E. (2019). Pustakawan Dengan Kepuasan Pemustaka. *Jurnal Pustaka Budaya*, 6(1), 26. <https://doi.org/10.31849/pb.v6i1.2229>
- Qori, M. (2022). Region Grouping Based on Teacher-Student Ratio at Education Level Using the K-Means Algorithm. *Journal Of Informatic Development*, 1(1), 34. <https://doi.org/10.30741/jid.v1i1.898>
- Rafid, R., & Tinus, A. (2019). Kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 7(2), 190. <https://doi.org/10.21831/amp.v7i2.28012>

- Renaldi, I., & Frinaldi, A. (2022). Implementation of Batang Arau Watershed Management with Good Environmental Governance Perspective. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 225–237. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.225-237>
- Sabon, S. S. (2023). Jurnal penelitian kebijakan pendidikan. *Penelitian Kebijakan Pendidikan Indonesia*, 15(3), 120.
- Sedana, I. M. (2022). Entitas Konten Pendidikan dalam Mengawal Ritme Kebijakan Terbaru Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Buleleng. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.55115/edukasi.v3i1.2311>
- Sinaga, D. M., Windarto, A. P., & Hartama, D. (2022). According to the Preamble of the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, one of the Republic of Indonesia's goals that must be maintained at all times is to educate the homeland's culture. *Jurnal Riset Teknik Informatika Dan Data Science*, 1(1), 2.
- Situmorang, S., & Wesnawa, I. G. A. (2018). Pertumbuhan Permukiman Di Kecamatan Buleleng. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.23887/jjpg.v6i1.20680>
- Sudarma, M., & Sumanaya, G. (2020). Peta Mutu Pendidikan Jenjang SD Kabupaten Buleleng. In *Kemendikbud. LPMP Provinsi Bali*.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*. Alfabeta.
- Sulistyawati, W., Wahyudi, & Trinuryono, S. (2022). Analysis (Quantitative Descriptive) of Student Learning Motivation Using the Blended Learning Model During the Covid19 Pandemic. *Kadikma*, 13(1), 70.
- Suwarno, D. K. (2019). Laboratory Management Competency Improvement Through Structured Training for Laboratory Heads at Teras Middle School Semester 2 Year 2016/2017. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2), 204–221. <https://doi.org/10.31316/g.couns.v3i2.313>
- Wardani, S. D. K., & Trihantoyo, S. (2021). Management of facilities and infrastructure in supporting the quality of student learning during the Covid-19 pandemic. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 09(3), 518.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Buleleng. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(6), 125.